

POSISI DAN PERAN PEMBANGUNAN UKM 2004-2009

Oleh : Noer Soetrisno

Pendahuluan

Periode 2004-2009 adalah periode yang sangat penting untuk meletakkan tonggak bagi membawa perekonomian Indonesia kembali pada posisi yang lebih baik. Sudah disadari bahwa tahun 2004 adalah tahun di mana secara makro perekonomian Indonesia telah kembali pada posisi sebelum krisis, meskipun masih menyisakan sektor yang belum berfungsi secara baik seperti perbankan. Di sisi lain dilihat dari perspektif pelaku usaha, kelompok usaha menengah masih belum pada posisi sebelum krisis sehingga keterkaitan antar struktur pelaku yang mempunyai dimensi penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia masih terganggu.

Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi bangsa Indonesia yang telah selamat dari terpaan krisis ekonomi yang meluas menjadi multi dimensi, Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Yusuf Kalla telah menyusun agenda pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang Ekonomi pemerintah telah menetapkan tujuh agenda perbaikan yang meliputi :

- a) Perbaikan penciptaan kesempatan kerja;
- b) Peningkatan kinerja dan stabilitas ekonomi makro;
- c) Penghapusan kemiskinan;

- d) Peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- e) Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas;
- f) Penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk; dan
- g) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup.

Perekonomian Indonesia selain menghadapi persoalan ketimpangan struktural dalam perolehan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja antar sektor, juga menghadapi ketimpangan nilai tambah antar pelaku atau antar kelompok skala kegiatan ekonomi dan sektor. Ketimpangan multi pesat semacam ini memang pantas untuk mendapat perhatian tersendiri sehingga penghilangan berbagai bentuk ketimpangan menjadi payung penting untuk menunjukkan betapa seriusnya masalah yang berkaitan dengan aspek tersebut di atas.

Arti penting usaha mikro kecil dan menengah dalam penyelesaian agenda ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu memang tidak bisa dibantah lagi, karena penyumbang lapangan pekerjaan terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah dari kelompok UMKM tersebut. Di samping itu persoalan yang dihadapi dalam menggerakkan perekonomian kita, terutama peningkatan produktivitas perekonomian kita juga bergantung pada

keberhasilan untuk mengangkat kelompok ini. Sektor tradisional yang umumnya memiliki produktivitas tenaga kerja yang rendah dan sebagian terdiri dari kelompok pemilik kegiatan ekonomi yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan. Sehingga pembangunan UMKM terutama usaha mikro akan mempunyai pengaruh ganda terhadap pencapaian sasaran dari agenda ekonomi pertama dan ketiga.

Tulisan ini akan menyampaikan beberapa pokok kebijakan strategis yang dapat diambil pemerintah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah untuk menyelesaikan agenda pembangunan ekonomi nasional.

Struktur Unit Usaha dan Perbaikan Penciptaan Kesempatan Kerja

Lapangan kerja di Indonesia 30% berada di sektor formal dan 70% di sektor non formal. Keadaan ini tentu akan menyulitkan upaya pemecahan hubungan ketenagakerjaan. Kecilnya porsi kesempatan kerja formal sangat erat hubungannya dengan struktur usaha yang

ada di mana dominasinya masih berada di sektor pertanian perdesaan dan perkotaan informal.

Jika dilihat secara struktural penyediaan lapangan kerja ini juga dapat dilihat dari unsur sumbangan antar pelaku usaha. Lapangan kerja sektor formal terdiri dari 0,55% disediakan oleh usaha besar (aset di luar tanah dan bangunan di atas Rp. 10 milyar diperkirakan omset di atas Rp. 50 milyar setiap tahun); usaha menengah 11,01% dan usaha kecil menyumbang 18,44% dari seluruh lapangan kerja formal.

Lapangan kerja non formal sebesar 70% disediakan oleh usaha kecil yang tergolong dalam usaha mikro dan gurem. Ini berarti telah mengisi sekitar 85% dari lapangan kerja yang ada di Indonesia. Berdasarkan perkiraan BPS pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 9,1 juta orang atau sekitar 9% dari seluruh angkatan kerja. Analisis struktural terhadap pelaku usaha, penyediaan lapangan kerja dan perolehan nilai tambah dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel 1.

Analisis tersebut sekaligus

Tabel 1:
Komposisi Kelompok Usaha, Penciptaan Lapangan Kerja Produktivitas dan Pembentukan Nilai Tambah Tahun 2003

Kelompok Usaha	Jumlah Unit Usaha	Penyerapan Tenaga Kerja (ribu orang)	Persentase Penyerapan TK(%)	Tenaga Kerja/ unit usaha (Orang)	Nilai Tambah/ Unit usaha adh k 93 (Rp. juta)	Persentase Nilai Tambah PDB
Usaha Besar (UB)	2.243	438	0,55	195	82.600	45,49
Usaha Menengah (UM)	61.986	8.755	11,01	141	1.200	14,77
Usaha Kecil formal (UKF)	973.510	10.542	18,44	11	28	6,10
Usaha Kecil non formal mikro (UKNF-Mikro)	41.353.520	59.740	70,00	1,5	4	33,64

Sumber : PDB dan Kesempatan Kerja BPS Dekomposisi usaha kecil formal non formal oleh Noer Soetrisno

memberikan dasar penghampiran kita selain melihat indikator yang lazim disampaikan seperti unit usaha, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah adalah penting untuk memperhatikan produktivitas baik pada skala perusahaan (unit usaha) maupun pada satuan tenaga kerja. Produktivitas adalah cerminan kemampuan untuk menghadapi persaingan dengan pelaku sejenis di luar negeri. Pada skala perusahaan dapat menggambarkan potensi untuk melihat peluang pengorganisasian dan restrukturisasi usaha yang menjamin kemampuan bersaing yang lebih tinggi dan perbaikan nilai tambah yang menjamin kesejahteraan lebih tinggi bagi yang terlibat di dalam kegiatan tersebut.

Memahami karakteristik usaha yang ada di Indonesia maka strategi terhadap kelompok usaha yang dapat ditempuh untuk memperbaiki kinerja penyediaan lapangan kerja adalah antara lain melalui perbaikan produktivitas perusahaan. Prioritas penanganan perbaikan produktivitas perusahaan pada usaha kecil dan menengah dapat diarahkan dengan tiga fokus utama yaitu :

- a) Sektor industri pengolahan;
- b) Sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;
- c) Sektor pertanian terutama sub sektor peternakan, perkebunan budidaya laut dan sub sektor hortikultura.

Dilihat dari struktur pelaku usaha menurut skala kegiatan dan karakteristiknya Pemerintah Indonesia harus memilih strategi yang jelas antara

orientasi pengembangan usaha kecil-menengah untuk tujuan peningkatan daya saing dan ekspor; dan orientasi pengembangan usaha mikro-kecil untuk orientasi penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan harus bersifat menyeluruh melalui penguatan dan perluasan lembaga keuangan mikro, LKM-pra koperasi, koperasi simpan pinjam dan BPR. LKM memiliki karakter pendampingan yang memadai sebagai salah satu cara pengamanan kredit, sehingga lebih dekat dengan nasabah di banding bank-komersial biasa. Untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh para petugas lapangan lembaga keuangan yang melayanani mereka. Untuk itu peningkatan kapasitas bagi petugas LKM di lapangan dalam hal pembinaan usaha bagi usaha mikro menjadi sangat penting.

Perbaikan Produktivitas dan Daya Saing

Peningkatan produktivitas usaha untuk pertumbuhan dan ekspor dapat dilaksanakan melalui peningkatan kinerja klaster industri yang ada. Indonesia cukup memiliki potensi pemusatan kegiatan perindustrian rakyat yang sejak lama telah berkembang dalam berbagai bentuk sentra.

Perkuatan terhadap sentra secara selektif dari sekitar 12.000 sentra industri yang ada juga telah terbukti mampu memberikan perbaikan dalam penyediaan modal, peningkatan penjualan dan

perluasan pasar bagi produk sentra yang ada.

Peningkatan kinerja dan pengembangan kluster bisnis UKM dapat dilaksanakan hanya bila pemerintah mampu melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Membentuk forum pengembangan sentra atau kluster bisnis UKM di daerah sehingga dinamisasi terus digerakan dan berlangsung di daerah serta dikembangkan oleh mereka sendiri;
- b) Menseleksi kluster potensial dan kluster ekspor untuk dikembangkan dan ditingkatkan dengan dukungan terpadu yang diperlukan;
- c) Melanjutkan perkuatan sentra UKM secara selektif di daerah potensi tinggi dan daerah otonom baru (kabupaten/kota) ataupun pusat/titik pertumbuhan baru.

Sementara itu untuk membuat peningkatan kinerja dan pengembangan kluster bisnis UKM perlu dilakukan berbagai langkah antara lain membangun Kluster baru atas dasar kebutuhan dan kelayakan untuk komoditas tertentu secara selektif. Misalnya peternakan, perkebunan, industri pengolahan dan budidaya kelautan serta pembangunan jaringan pemasaran di dalam dan luar negeri melalui dukungan promosi ekspor, pembentukan trading house dan prasarana yang diperlukan.

Pengembangan Industri Jasa Perusahaan

Kunci penggerak untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing dalam melaksanakan strategi dimaksud adalah sub-sektor jasa perusahaan karena sub-sektor ini mempunyai sumbangan yang penting dalam pembentukan PDB (1,30-2,00%) dan kualitas nilai tambah karena kandungan IPTEK dan *Good Corporate Governance* yang tinggi dibanding sektor lain kecuali sub-sektor jasa keuangan. Sub-sektor jasa perusahaan memang masih jauh dari perhatian kita dalam pengembangan UKM. Padahal produk jasa yang dihasilkan adalah vital bagi kemajuan perusahaan dan pengembangan hubungan bisnis baik lokal maupun internasional.

Kegiatan yang termasuk dalam sub-sektor jasa perusahaan antara lain :

- Jasa Konsultasi Piranti Keras
- Jasa Konsultasi Piranti Lunak
- Pengolahan Data
- Perawatan Reparasi Mesin Kantor, Komputer, dll
- Penelitian dan Pengembangan
- Rekayasa Teknologi
- Jasa Hukum
- Jasa Akuntansi dan Perpajakan
- Jasa Riset Pemasaran
- Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen
- Jasa Konsultasi Engineering Dll
- Analisis dan Testing
- Jasa Periklanan
- Seleksi Tenaga Kerja
- Fotocopy dll

Tabel 2
Perkembangan Nilai Tambah Sub Sektor Jasa Perusahaan
a.d.h 1997-2000

Tahun	Nilai Tambah (Rp Juta)		Persen JasaPerusahaan terhadap PDB (%)
	Jasa Perusahaan	PDB	
1997	11.439,7	627.695,5	1,82
1998	15.041,2	955.753,5	1,57
1999	15.679,3	1.109.979,5	1,41
2000	17.873,9	1.290.684,2	1,38
2001	19.944,5	1.467.654,8	1,36
2002	22.547,9	1.610.565,0	1,40
2003	24.675,7	1.786.690,9	1,38

Sumber : BPS (diolah dari statistik Indonesia tahun 2000 dan 2003

Perbandingan : - Sebanding dengan sub-sektor kehutanan
 - Di atas sektor Listrik, gas kota dan air bersih
 - Dua kali lipat dibanding sub-sektor Hotel

Posisi penting sektor jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan untuk peningkatan produktivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif. Ciri-ciri yang dimiliki oleh kegiatan yang ada di dalam sub-sektor ini yaitu :

- a) Harus memenuhi persyaratan legal (badan hukum, ijin, persyaratan teknis);
- b) Di kelola oleh kelompok profesional;
- c) Interaksi dengan dunia bisnis yang luas;
- d) Kandungan IPTEK tinggi;
- e) Terbiasa dengan hubungan kontraktual yang lugas;
- f) Relatif lebih transparan di banding kelompok lain;
- g) Adanya pengawasan dari luar yang kuat baik oleh sistem pengawasan intern dan ekstern maupun oleh pengguna jasa.

Karena fungsi produk jasanya yang penting bagi pengembangan usaha serta karakteristiknya yang sesuai dengan persyaratan usaha modern, maka sub-sektor jasa perusahaan juga merupakan instrumen penting untuk formalisasi dan modernisasi bisnis yang ada di Indonesia. Penyediaan pembiayaan dan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank menjadi terhambat karena ketiadaan industri jasa perusahaan yang mendukungnya.

Demikian juga permintaan pasar luar negeri yang tidak dapat direalisasikan sebagiannya berhubungan dengan ketidakmampuan usaha kecil dan menengah memenuhi segala persyaratan administrasi. Program pengenalan lembaga pelayanan bisnis (BDS=business development service) yang untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah (BPS-KPKM) pada tahun 2001 adalah sebuah kesadaran akan hal ini (Noer Soetrisno, 2002). Sayangnya pengembangan kearah industri jasa perusahaan yang lebih besar lagi tidak lagi menjadi fokus pada periode berikutnya setelah BPS-KPKM dibubarkan. Sehingga BDS tinggal menjadi BDS, padahal seharusnya dapat diperankan menjadi dinamisator untuk menjangkau integrasi industri jasa perusahaan ke dalam pemberdayaan UKM.

Kini belum terlambat, untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dalam peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah diatas laju pertumbuhan produktivitas nasional kita memerlukan kehadiran sub-sektor industri jasa perusahaan yang kuat dan menjadi bagian

dari komitmen tersebut.

Faktor penggerak penting lain yang harus menjadi perhatian kita adalah penumbuhan usaha baru untuk memperbaiki struktur perekonomian dan struktur pelaku usaha didalam perekonomian Indonesia. Langkah yang dapat ditempuh adalah :

- a) Mengembangkan program bersama untuk penumbuhan unit kerja usaha baru dengan lintas sektor dan daerah;
- b) Menumbuhkan 300 inkubator baru selama 5 tahun untuk mendorong penciptaan usaha baru dengan fokus keahlian pada teknologi industri, teknologi informasi dan teknologi untuk pengolahan hasil pertanian;
- c) Menempatkan sasaran membangun 10 juta usaha baru dalam 5 tahun atau sekurang-kurangnya 6 juta. Secara khusus 2 juta diantaranya adalah UKM bukan usaha mikro dan 1 juta berada pada sektor industri pengolahan;
- d) Mendorong program penyiapan wirausaha baru yang bersifat lintas sektor.

Program Penanggulangan Kemiskinan

Pengurangan jumlah penduduk miskin tidak hanya berkaitan dengan pengangguran, tetapi pekerja setengah menganggur dan sektor non formal dengan

Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004

nilai tambah rendah atau resiko usaha tinggi. Untuk itu kuncinya terletak pada peningkatan produktivitas usaha (nilai tambah) untuk meningkatkan nilai tambah per tenaga kerja. Untuk itu terdapat dua jalur perbaikan :

- Produktivitas dengan intervensi sosial untuk menjadikan masyarakat lebih produktif melalui program sektoral dengan dukungan APBN dan perluasannya.
- Peningkatan pelayanan LKM untuk meningkatkan kinerja usaha mikro (secara khusus gurem). Upaya ini di dukung dengan memperkuat kemampuan LKM dalam pendampingan usaha pada para nasabah.

Dengan data yang ada dimana 41 juta unit usaha yang ada adalah usaha mikro, maka sebenarnya pekerjaan terbesar adalah mengangkat instrumen penting bagi pengembangan usaha mikro supaya lebih produktif. Untuk itu aspek pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah menjadi amat penting. Skema dukungan finansial pemberdayaan UMKM dikembangkan dengan menata sistem pembiayaan UMKM secara fungsional. Untuk pembiayaan mikro ditempuh dengan :

- a) meningkatkan perkreditan/ pembiayaan mikro didukung dengan perluasan dan peningkatan kemampuan LKM bagi usaha mikro;

- b) mempeluas dan memperbesar kemampuan modal ventura untuk mendukung perluasan usaha, penyehatan usaha dan alih usaha bagi UKM;
- c) Meningkatkan koordinasi dan informasi program perkreditan perbankan untuk UKM;
- d) Memperluas ketersediaan penjaminan dan asuransi kredit untuk UKM;
- e) Melakukan konsolidasi untuk menjaga efektifitas pengguliran dana bergulir yang sudah disalurkan ke masyarakat.

Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Salah satu dimensi penting dalam cita-cita pendiri bangsa tentang pembangunan sistem ekonomi Indonesia adalah hadirnya kelembagaan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai bagi perekonomian rakyat Indonesia. Pengembangan koperasi yang diidolakan sebagai "Sokoguru Perekonomian Nasional" harus dijalankan dalam kerangka arus utama pembangunan ekonomi : koperasi sebagai wahana perbaikan ekonomi bagi warga negara yang berkoperasi dan didudukkan kembali sebagai gerakan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Tugas utama negara adalah fungsi "pengaturan atau regulatory" dan secara selektif fungsi

“pembangunan atau development”.

Dalam hal pembangunan koperasi fokus perhatian harus tertuju pada :

- a) penertiban administrasi badan hukum koperasi;
- b) menata pengawasan pengesahan badan hukum koperasi baru;
- c) menyelenggarakan akreditasi atau penilaian badan hukum koperasi secara teratur dan berlanjut sebagai bentuk perlindungan publik yang berkoperasi;
- d) memperkuat lembaga pengembangan SDM gerakan koperasi;
- e) memperkuat lembaga keuangan koperasi dengan mempersiapkan arsitektur simpan pinjam koperasi Indonesia dengan menempatkan Kabupaten/Kota sebagai basis pemusatan dan mengkaitkan dengan sistem perbankan nasional;
- f) perkuatan permodalan hanya dilakukan selektif dan diarahkan untuk memperkuat sistem keuangan koperasi bukan bantuan kepada koperasi secara individual yang menimbulkan distorsi serta merugikan koperasi yang baik.

Kontek kehadiran kelembagaan koperasi yang kuat dengan pemberdayaan UKM terutama usaha mikro adalah keberadaan wahana untuk bekerjasama bagi para produsen dan konsumen serta pengguna jasa terutama jasa keuangan. Dengan peta kekuatan koperasi Indonesia setelah lima tahun dilanda krisis, di mana aset koperasi lebih dari separuhnya berada pada kegiatan jasa keuangan, maka tidak dapat diragukan lagi koperasi sebagai pemain LKM yang penting setelah perbankan. Dan oleh karena itu posisi ini diharapkan dapat terus mendongkrak citra koperasi. Meskipun harus disadari dalam perspektif akhir 2009 persaingan disektor ini akan semakin ketat. Oleh karena itu konsolidasi lembaga keuangan koperasi menjadi penting.

Penutup

Posisi dan peran pembangunan UKM dalam lima tahun mendatang harus mengikuti pola “dual track strategy” yaitu peningkatan daya saing untuk pertumbuhan dan ekspor serta dukungan terhadap perluasan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Untuk tujuan yang pertama penguatan lembaga pendukung terutama sub-sektor jasa perusahaan harus menjadi unsur pendorong. Pada tujuan yang kedua lembaga keuangan mikro harus menjadi fokus perkuatan disertai dengan pengembangan sistem kelembagaan yang efisien serta peningkatan kapasitas pendamping bagi usaha mikro oleh petugas lapangan LKM.

DAFTAR PUSTAKA

BPS : *Statistik Indonesia 2000 dan 2003*, Jakarta;

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi - BPS : *Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009*, Jakarta 2004;

Kementerian Koperasi – BPS : *Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah dan Ekspor UKM Serta Peranannya terhadap Tenaga Kerja Nasional dan PDB menurut harga konstan dan harga berlaku*, Jakarta, 2003;

Soetrisno, Noer : *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat*, Jakarta : InstranS, 2001;

_____ : *Strategi Penguatan UKM melalui Pendekatan Klaster Bisnis : Konsep, Pengalaman Empiris, dan Harapan*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2002;

_____ : *Providing Financial Support For Micro Enterprise Development in Indonesia*, Kementerian Koperasi dan PT. Falintim, Jakarta, 2003;

_____ : *SME Clustering Strategy in Indonesia An Integrated Development Supports*, Jakarta, 2003.